

15

KEPENTINGAN PEREMPUAN JAWA TIMUR PADA PEMILU 2014



Pendidikan yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat marginal 1

- ▶ 20% APBD Kota/Kabupaten dan Propinsi Jawa Timur dialokasikan untuk program pendidikan dan tidak memasukkan belanja pegawai/guru dalam anggaran.
- ▶ Kebijakan pemerintah yang memastikan buku pelajaran siswa SD sampai dengan SMA dapat digunakan 5 tahun ke depan
- ▶ Memberikan akses pendidikan yang sama ke pada masyarakat miskin baik yang mempunyai KTP di wilayah tersebut atau tidak
- ▶ Bantuan pendidikan, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran pendidikan oleh Dinas terkait dapat diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Timur melalui media cetak maupun elektronik

Layanan Kesehatan khususnya kesehatan Reproduksi Perempuan murah dan mudah diakses oleh masyarakat marginal 2

- ▶ 20% APBD Kota/Kabupaten dan Propinsi Jawa Timur dialokasikan untuk program kesehatan yang dialokasikan khusus masyarakat marginal.
- ▶ Pembebasan biaya BPJS untuk warga miskin (lansia, ODHA, disabilitas dll)
- ▶ Adanya jaminan layanan kesehatan reproduksi perempuan (misal, papsmer, tes darah) di setiap Puskesmas atau pun Puskesmas Pembantu (Pustu) di Jawa Timur
- ▶ Memastikan tidak ada perlakuan diskriminatif bagi masyarakat yang mempunyai KTP Jawa Timur maupun tidak untuk mendapatkan layanan kesehatan diberbagai Rumah Sakit di Jawa Timur.

Pemenuhan Air Bersih yang murah bagi masyarakat miskin 3

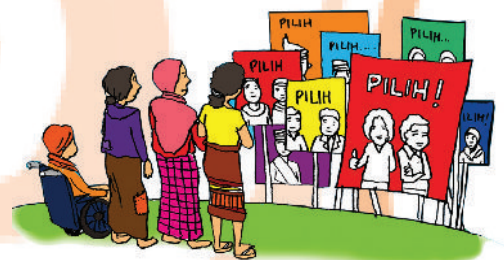
- ▶ Mengalokasikan subsidi air bersih 20% untuk pemenuhan air bersih, murah berkualitas agar terjangkau untuk masyarakat miskin
- ▶ Pengelolaan air bersih tidak diserahkan ke pada pihak swasta (diprivatisasi) tetapi tetap dikelola oleh PDAM Jatim.
- ▶ Layanan air yang berkualitas, bersih, sesuai dengan standard kesehatan (tidak keruh, tidak berbau, dan tidak mengandung bahan beracun berbahaya), murah, dan mudah diakses.

Kekerasan Terhadap perempuan 4

- ▶ Perlindungan dan penyediaan rumah aman (shelter) kepada perempuan dan kelompok marginal korban kekerasan.
- ▶ Penyediaan tempat/pos pengaduan pada titik yg dianggap rawan terjadinya kekerasan (bandara, pelabuhan, terminal, sekolah dll)
- ▶ Pembuatan kebijakan/Perda yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan kelompok marginal lainnya (anak, disabilitas, ODHA, LBT dll) dengan sanksi yang tegas kepada para pelaku.
- ▶ Penyediaan layanan trauma healing bagi korban kekerasan

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Buruh Rumahan (our sourcing) dan buruh pabrik 5

- ▶ Perlindungan dan pengakuan kepada buruh rumahan sebagai pekerja yang memiliki hak yang sama dengan buruh pabrik dan upah yang sesuai dengan UMK Jawa Timur (disesuaikan dengan kebijakan setiap kab/kota)
- ▶ Pihak perusahaan memberikan pengakuan hak, baik upah maupun jaminan kesehatan buruh rumahan diperlakukan sama dengan buruh pabrik.
- ▶ Pemerintah kabupaten, provinsi mengeluarkan kebijakan yang memastikan perusahaan memberikan hak cuti kepada buruh perempuan di pabrik yang ada di Jawa Timur, seperti cuti haid, melahirkan dan mengasuh anak tanpa adanya pemotongan gaji.
- ▶ Peraturan system outsourcing yang telah menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan memaksa buruh perempuan menjadi buruh rumahan dengan tanpa perlindungan dan pemenuhan hak yang semakin memiskinkan perempuan.



Penanganan Banjir dan Bencana alam yang baik 6

- ▶ Pengadaan dan perbaikan drainase di setiap desa, kecamatan dan kabupaten/kota yang rentan dengan banjir
- ▶ Mengeluarkan peraturan pemerintah (Perda) untuk larangan membuang sampah ditempat-tempat yang dapat menyebabkan banjir dan penyediaan tempat sampah yang terpisah (sampah kering dan sampah basah)
- ▶ Penyediaan kontainer sampah dan tempat sampah (ditingkat desa/lingkungan/kecamatan/kabupaten) dan tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- ▶ Mengeluarkan kebijakan larangan melakukan penebangan pohon secara liar dan besar-besar di hutan yang ada di Jatim
- ▶ Memberikan bantuan dan evakuasi kepada masyarakat yang rumah/pemukimannya terendam banjir dan korban bencana alam.
- ▶ Ada alokasi khusus tanggap bencana untuk wilayah dan warga masyarakat yang wilayahnya rentan mengalami bencana dan menyediakan tempat pengungsi yang sehat dan aman bagi perempuan, anak dan kelompok marginal.

Transportasi Publik yang aman dan ramah bagi perempuan dan kelompok marginal 7

- ▶ Penyediaan transportasi umum yang aman dan nyaman bagi perempuan dan kelompok rentan.
- ▶ Memastikan di setiap terminal, pelabuhan, bandara mempunyai ruang khusus yang aman dan nyaman bagi perempuan menyusui, toilet dan bagi perokok.

Penyediaan lapangan pekerjaan 8

- ▶ Memastikan pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat marginal.
- ▶ Memberikan perlindungan kepada usaha kecil yang dibuat masyarakat (industri rumahan) dan membantu memasarkan/mempromosikan produk yang dihasilkan.
- ▶ Membentuk dan mendorong koperasi rakyat yang mudah dikelola dan diakses oleh masyarakat marginal serta usaha kecil rumahan.

Lingkungan yang sehat dan tidak dieksploitasi untuk kepentingan investor dan Lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, Asian Development Bank dll) 9

- ▶ Mengeluarkan kebijakan Nasional dan Daerah yang memastikan perawatan dan perlindungan lingkungan dan ekosistem untuk berkembang.
- ▶ Perlindungan terhadap hutan lindung, hutan adat dari proyek-proyek yang eksploitatif terhadap lingkungan hidup yang didanai oleh investor dan lembaga keuangan internasional.
- ▶ Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat khususnya masyarakat adat untuk mengelola hutan dan sumberdaya alam di wilayahnya.
- ▶ Pengelolaan limbah rumah tangga, perusahaan, rumah sakit dan hotel yang ramah lingkungan.
- ▶ Menindak tegas perusahaan yang melakukan eksploitasi dan menyebabkan bencana kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- ▶ Penghentian izin perusahaan pelaku pengrusakan lingkungan

Perlindungan terhadap korban Trafiking dan kekerasan TKI dan Buruh Migran Perempuan (BMP) 10

- ▶ Memastikan pemerintah daerah Kab/kota dan Provinsi mengeluarkan kebijakan yang menindak tegas pelaku/oknum /perusahaan tenaga kerja yang melakukan trafficking kepada pekerja yang akan bekerja ke Luar Negeri dan Dalam Negeri.
- ▶ Melakukan pengawasan secara berkala terhadap dinas tenaga kerja dan PJTKI yang akan mengirimkan TKI khususnya Buruh Migran Perempuan (BMP) ke Luar Negeri dengan keterampilan, skill yang baik dan pemahaman hak-hak selama bekerja sebarai buruh migran.
- ▶ Melakukan koordinasi dengan pihak terkait jika TKI/BMP mengalami kasus dan melakukan pendampingan yang intensif kepada TKI/BMP hingga kasusnya selesai.
- ▶ Membuka posko pengaduan TKI, BMP dan keluarganya jika ada kasus trafficking dan kekerasan yang dialami oleh TKI khususnya BMP.

Listrik yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat marginal 11

- ▶ Pemerintah daerah memastikan ketersediaan listrik di wilayah Jawa Timur khususnya daerah terpencil.
- ▶ Memastikan subsidi pemerintah minimal 15% untuk listrik kepada masyarakat miskin termasuk perempuan kepala rumah tangga yang dikelola oleh PLN.
- ▶ Memastikan BUMN (PLN) tidak diswastanisasi yang akan semakin memiskinkan masyarakat khususnya perempuan marginal.
- ▶ Menyediakan akses atas pelayanan KWH (meteran) tidak dengan sistem pra bayar (voucher).

Subsidi BBM kepada masyarakat miskin dengan harga yang murah dan mudah diakses 12

- ▶ 20% APBD Kota/Kabupaten dan Propinsi Jawa Timur dialokasikan untuk program subsidi BBM kepada masyarakat miskin dan memastikan tidak akan diakses oleh masyarakat menengah keatas.
- ▶ Memastikan ketersediaan BBM kepada seluruh masyarakat dengan adanya kebijakan nasional dan daerah (perda) khususnya pada perayaan hari-hari besar.

Pemberantasan Korupsi diberbagai tingkatan 13

- ▶ Memastikan koruptor disetiap tingkatan (nasional, provinsi, kab/kota, kec dan desa) mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- ▶ Memberikan perlindungan terhadap saksi yang mengetahui dan melaporkan praktek-praktek korupsi baik ditingkatan eksekutif maupun legislative.
- ▶ Membuka kepublik anggaran dan program ditingkat nasional, provinsi, kab/kota, kec dan desa.



Perlindungan pengelolaan pangan dan bibit local yang mudah diakses oleh petani dan masyarakat 14

- ▶ Mengeluarkan kebijakan ditingkat Nasional dan Daerah yang memberikan perlindungan pengelolaan pangan dan bibit local yang mudah diakses oleh petani dan masyarakat Jawa Timur.
- ▶ Pemerintah melindungi hak petani perempuan mulai dari proses produksi, distribusi dan konsumsi yang dikendalikan oleh petani dan nelayan.
- ▶ Membuka dan mempromosikan pasar pangan local di wilayah Jatim, sebagai ruang bagi masyarakat khususnya perempuan mempertahankan pangan dan kearifan local.
- ▶ Pemerintah memastikan perlindungan lahan pertanian milik petani tidak diambil alih atau dialih fungsikan oleh kepentingan pemilik modal/investor.
- ▶ Pemerintah mengeluarkan kebijakan penghentian alih fungsi lahan produktif

Pengusuran terhadap pemukiman penduduk, PK5 dan sumber-sumber kehidupan perempuan lainnya 15

- ▶ Jaminan ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang tempat tinggal dan tempat usahanya (PK5) digusur dengan biaya yang mencakup pembuatan bangunan dan kerugian usaha. Dan jika terjadi relokasi, penghasilan tidak lebih rendah dari tempat sebelumnya.
- ▶ Pemerintah tidak melakukan pengusuran tetapi penataan kampung yang bebas biaya dan juga legalitas tanah diperuntukkan bagi perempuan, kelompok marginal dan masyarakat miskin untuk perlindungan hak ekonomi.
- ▶ Memastikan selama 5 tahun tidak terjadi pengusuran atau penertiban terhadap PK5 dan sumber-sumber kehidupan perempuan dan kelompok marginal dengan menggunakan cara-cara kekerasan.
- ▶ Penyediaan rumah layak huni/rumah susun bagi penduduk miskin kota/kabupaten (PK5, urban, kelompok marginal) yang murah dan mudah diakses.
- ▶ Minimal 30% perempuan marginal dilibatkan pemerintah terhadap program yang akan dilakukan mulai dari perencanaan, implementasi/pembangunan hingga evaluasi.